

## ETIKA ASESMEN PSIKOLOGI DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING : MENJAGA KERAHASIAAN DAN KEOBJEKTIFAN HASIL

Ika Himatul Azmi

Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email Korespondensi :

[24010014099@mhs.unesa.ac.id](mailto:24010014099@mhs.unesa.ac.id)

### ABSTRAK

Etika adalah bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan penilaian psikologis, terutama dalam bidang bimbingan dan konseling. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi fungsi prinsip etika dalam melindungi kerahasiaan dan objektivitas hasil penilaian psikologis, serta menganalisis tantangan dan solusi yang muncul dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka, yang mempelajari berbagai sumber akademis baik lokal maupun internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerahasiaan adalah fondasi utama untuk menjaga kepercayaan antara konselor dan klien, sedangkan objektivitas menjadi faktor penting untuk mendapatkan hasil penilaian yang sah dan adil. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada tantangan seperti inkonsistensi dalam penerapan etika, kemungkinan adanya bias budaya, dan kurangnya pelatihan profesional. Artikel ini menyoroti pentingnya memperkuat pemahaman mengenai etika profesi, penggunaan instrumen yang telah distandarisasi, serta pengembangan kompetensi konselor untuk memastikan integritas proses penilaian. Temuan ini memiliki implikasi signifikan bagi pengembangan layanan bimbingan dan konseling yang profesional, berorientasi pada kemanusiaan, dan berdasarkan etika.

**Kata Kunci :** etika asesmen, kerahasiaan, objektivitas, bimbingan dan konseling, studi literatur

### ABSTRACT

*Ethics are a very important part in the implementation of psychological assessment, especially in the field of guidance and counseling. This article aims to explore the function of ethical principles in protecting the confidentiality and objectivity of psychological assessment results, as well as analyzing the challenges and solutions that arise in practice. This study uses a qualitative method with a literature review approach, which studies various academic sources both locally and internationally. The results of the analysis show that confidentiality is the main foundation for maintaining trust between counselors and clients, while objectivity is an important factor in obtaining valid and fair assessment results. However, in its implementation, there are still challenges such as inconsistency in the application of ethics, the possibility of cultural bias, and lack of professional training. This article highlights the importance of strengthening understanding of professional ethics, the use of standardized instruments, and the development of counselor competencies to ensure the integrity of the assessment process. These findings have significant implications for the*

### Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 119

DOI : Prefix DOI :

10.8734/liberosis.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Liberosis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*development of professional, humanity-oriented, and ethical guidance and counseling services.*

**Keywords :** *assessment ethics, confidentiality, objectivity, guidance and counseling, literature study*

## PENDAHULUAN

Bimbingan dan konseling diartikan sebagai suatu kajian menyeluruh mengenai metode atau langkah-langkah dalam memberikan dukungan kepada individu (klien) untuk membantu mereka dalam pengembangan diri, penyelesaian masalah, dan pencapaian tujuan tertentu. Secara lebih spesifik, (Gibson, R.L & Mitchel, M.H, 2008) menjelaskan bahwa BK merupakan layanan dukungan bagi siswa, baik secara individu maupun kelompok, agar mereka bisa mandiri dan berkembang dengan baik dalam aspek pribadi, sosial, pembelajaran, dan karier, melalui berbagai layanan dan kegiatan pendukung yang mengikuti norma yang ada.

Pentingnya penerapan etika dalam evaluasi psikologis telah menjadi sorotan dalam berbagai studi. (Agatha, Budiman, & Nadirah, 2023) menegaskan bahwa penggunaan alat ukur psikologis dalam proses bimbingan dan konseling harus dilakukan dengan cara yang profesional serta etis, dengan memperhatikan batasan dan jenis alat yang tepat serta dampak penggunaannya terhadap konseli. Selain itu, (Daniati, Solfema, & Karneli, Penerapan Prinsip Etika dan Estetika dalam Bimbingan Konseling, 2024) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika seperti privasi, kompetensi, dan keadilan sangat berpengaruh terhadap hubungan terapeutik antara konselor dengan klien, serta pada kualitas layanan bimbingan konseling secara keseluruhan.

Kemajuan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan baru dalam pelaksanaan evaluasi psikologis, khususnya terkait dengan layanan konseling online. (Pardamean, et al., 2024) mengungkapkan bahwa dalam konseling online, konselor harus menjaga kerahasiaan data konseli dan mematuhi standar etika profesional yang berlaku, termasuk dalam penggunaan media dan teknologi komunikasi. Hal ini sejalan dengan penemuan (Anindya, Budiman, & Nadhiroh, 2024) yang menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi konseli dalam layanan konseling daring, serta kebutuhan bagi konselor untuk mengerti dan menerapkan etika profesi dalam konteks digital.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, artikel ini bertujuan untuk meneliti peran prinsip etika dalam menjaga privasi dan objektivitas hasil evaluasi psikologis, serta mengkaji tantangan dan solusi yang muncul dalam penerapannya, terutama dalam konteks layanan bimbingan dan konseling di Indonesia.

BK juga diinterpretasikan sebagai suatu proses di mana seorang ahli (konselor) memberikan bantuan melalui sesi wawancara kepada individu yang mengalami masalah, dengan tujuan untuk membantu mereka mengatasi masalah tersebut serta memahami diri sendiri dan merencanakan masa depan yang lebih baik demi mencapai kesejahteraan.

Bimbingan dan Konseling (BK) adalah sebuah bidang studi yang fokus pada penyediaan dukungan profesional bagi individu atau kelompok untuk mengoptimalkan potensi diri, menyelesaikan masalah yang dihadapi, serta mencapai kualitas hidup yang lebih baik. BK tidak sekadar sebagai aktivitas bantu-membantu, melainkan merupakan suatu kajian ilmiah yang mendalam tentang cara dan prosedur dalam memberikan bantuan yang terstruktur dan terencana. BK mendukung perkembangan serta perubahan positif individu melalui layanan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip psikologis, sosial, budaya, dan etika. Dalam pelaksanaannya, konselor berperan krusial dalam membantu klien untuk memahami dirinya, mengasah keterampilan pribadi, dan mengambil keputusan yang bijaksana untuk masa depannya. BK bersifat multidisiplin karena mengadopsi berbagai pendekatan dari psikologi, sosiologi, antropologi, sampai biologi. Oleh karena itu, BK tidak hanya berakar pada psikologi saja, tetapi mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu yang menjadikan manusia sebagai subjek dan objek

kajian. Dalam konteks ini, ilmu BK juga menekankan nilai-nilai kemanusiaan sebagai dasar etika dalam penyelenggaraan layanan, seperti kerahasiaan, sukarela, keadilan, dan kebebasan klien dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, BK sebagai sebuah ilmu bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan manusia secara menyeluruh melalui interaksi konseling yang bermartabat dan berlandaskan nilai.

Dalam kegiatan bimbingan dan konseling, penilaian psikologis menjadi elemen penting yang bertujuan untuk menggali karakter, kebutuhan, serta potensi konseli secara menyeluruh. Penilaian ini melibatkan berbagai teknik, seperti wawancara, pengamatan, angket, dan tes psikologis, yang ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dalam mendukung proses konseling (Gregory, 2014). Namun, pelaksanaan penilaian psikologis tidak luput dari masalah etika, terutama dalam hal menjaga kerahasiaan informasi dan objektivitas dalam penilaian.

Kerahasiaan dalam penilaian psikologis mengacu pada tanggung jawab profesional untuk menjaga informasi pribadi konseli agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berwenang. Prinsip ini sangat penting untuk membangun hubungan saling percaya antara konselor dan konseli, yang merupakan kunci bagi keberhasilan proses konseling. Namun, dalam kenyataannya, konselor sering kali dihadapkan dengan dilema etis saat harus mempertimbangkan apakah informasi tertentu harus dibagikan kepada pihak ketiga demi kebaikan konseli (Sullivan, J. R, Ramirez, E, Rae, W. A, Peña Razo, M, & George, C, 2002)

Objektivitas dalam penilaian psikologis menuntut konselor untuk tidak terpengaruh oleh bias pribadi, stereotip, atau faktor luar saat menginterpretasikan hasil dari penilaian. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa objektivitas sering kali terganggu oleh prasangka dan keterbatasan alat yang ada, sehingga diperlukan pelatihan yang memadai serta sarana yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut.

Oleh karena itu, Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan secara mendalam mengenai prinsip-prinsip etika yang terkait dengan penilaian psikologis dalam konteks bimbingan dan konseling, dengan perhatian khusus pada masalah kerahasiaan dan objektivitas, serta memberikan contoh penerapan dan solusi dalam praktik profesional.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Asesmen Psikologis dalam Bimbingan dan Konseling**

Asesmen psikologis merupakan kegiatan yang terorganisir dan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menafsirkan informasi yang berhubungan dengan individu. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memahami secara mendalam tentang perilaku, kemampuan berpikir, keadaan emosi, karakter, dan aspek psikologis lainnya. Dalam ruang lingkup bimbingan dan konseling, asesmen memiliki peranan penting dalam membantu konselor untuk mengidentifikasi kebutuhan, potensi, minat, dan masalah yang dihadapi konseli, sehingga konselor dapat merancang strategi intervensi yang tepat, efisien, dan sesuai dengan masing-masing individu (Gregory, 2014).

Berbagai jenis asesmen digunakan dalam praktik konseling, di antaranya tes psikometrik (seperti tes IQ, tes kepribadian, atau tes minat), wawancara mendalam yang bertujuan untuk menggali informasi kualitatif, observasi perilaku untuk melihat reaksi nyata konseli dalam situasi tertentu, serta kuesioner atau inventori yang membantu dalam menggambarkan pola pikir dan emosi secara teratur. Penggunaan alat dan teknik asesmen ini harus dilakukan dengan memprioritaskan prinsip etika, seperti menjaga kerahasiaan, mendapatkan persetujuan yang diinformasikan, keadilan, serta kualitas profesional. Aspek ini penting untuk memastikan bahwa proses asesmen tidak hanya menghasilkan informasi yang akurat dan objektif, tetapi juga menghormati martabat, hak, dan kesejahteraan konseli (Neukrug, 2016).

### **Prinsip Etika dalam Asesmen Psikologis**

Etika dalam penilaian psikologis berkaitan dengan sekumpulan prinsip moral dan profesional yang mengarahkan perilaku konselor dalam proses pengumpulan, analisis, dan

penyampaian informasi tentang klien. Prinsip-prinsip ini meliputi kerahasiaan, objektivitas, keadilan, serta kompetensi profesional. (Agatha, Budiman, & Nadirah, 2023) menyoroti bahwa penerapan tes psikologi dalam bimbingan dan konseling harus dilakukan dengan cara yang profesional dan etis, dengan mempertimbangkan batasan serta tipe tes yang tepat dan dampaknya terhadap klien. Etika dalam asesmen psikologis melibatkan serangkaian nilai moral dan profesional yang bertujuan melindungi kesejahteraan klien serta menjaga integritas dan reputasi profesi konselor atau psikolog. Praktik asesmen yang etis tidak hanya mengikuti standar ilmiah dan teknis, tetapi juga mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial dari proses penilaian terhadap individu yang dinilai. Dua prinsip etis utama yang sangat relevan dalam konteks asesmen psikologis adalah kerahasiaan (confidentiality) dan objektivitas (objectivity), yang keduanya sangat penting dalam menciptakan praktik konseling yang bertanggung jawab dan perhatian pada kepentingan terbaik klien.

### 1. Kerahasiaan (Confidentiality)

Kerahasiaan merujuk pada kewajiban profesional konselor atau psikolog untuk melindungi semua informasi pribadi yang diperoleh dari klien selama proses asesmen dan konseling. Informasi ini mencakup data dari tes, wawancara, observasi, serta semua bentuk komunikasi yang terjadi antara konselor dan klien. Kerahasiaan adalah dasar yang sangat penting dalam kegiatan bimbingan dan konseling. (Aristri, 2024) menyatakan bahwa konselor memiliki tanggung jawab etis untuk menjelaskan betapa pentingnya menjaga kerahasiaan selama sesi konseling kelompok, karena keberhasilan konseling sangat terkait dengan penerapan prinsip ini. Dalam arena layanan konseling daring, (Anindya, Budiman, & Nadhiroh, 2024) menekankan tantangan dalam melindungi kerahasiaan informasi konseli, seperti kemungkinan kebocoran informasi dan perlunya pemahaman konselor mengenai etika profesi di dunia digital. Prinsip ini memainkan peran penting dalam menciptakan dan menjaga hubungan yang bertumpu pada kepercayaan, yang menjadi inti dari proses bantuan psikologis yang efektif. Pedoman etika dari American Psychological Association (APA) dengan jelas menyatakan bahwa profesional diwajibkan untuk merahasiakan semua informasi klien, kecuali dalam keadaan tertentu di mana ada risiko bahaya serius bagi klien atau orang lain, atau ketika ada kewajiban hukum untuk mengungkapkan informasi tersebut. Situasi ini dikenal sebagai “tanggung jawab untuk memperingatkan” atau “tanggung jawab untuk melindungi,” yang menekankan tugas profesional untuk mengambil langkah pencegahan jika klien menunjukkan indikasi akan melakukan tindakan yang berbahaya untuk diri sendiri atau orang lain. Dalam praktik sehari-hari, penerapan prinsip kerahasiaan tidak hanya terbatas pada komunikasi lisan, tetapi juga mencakup cara penyimpanan dokumen, catatan asesmen, serta data digital yang harus dilindungi dengan sistem keamanan yang memadai. Para konselor juga harus mendapatkan persetujuan tertulis dari klien (informed consent) sebelum membagikan informasi kepada pihak ketiga, seperti orang tua, guru, atau lembaga lainnya. Selain itu, penting bagi konselor untuk menjelaskan batasan kerahasiaan di awal hubungan konseling agar terjadi pemahaman yang saling transparan dan jujur (Sullivan, J. R, Ramirez, E, Rae, W. A, Peña Razo, M, & George, C, 2002).

### 2. Objektivitas (Objectivity)

Objektivitas adalah prinsip etis yang mengharuskan konselor atau psikolog untuk bersikap netral, tidak berpihak, serta terhindar dari pengaruh bias pribadi saat mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi yang diperoleh dari asesmen. Prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil asesmen benar-benar mencerminkan keadaan, potensi, dan kebutuhan klien secara akurat dan tidak terdistorsi oleh pandangan subjektif dari pihak yang melakukan penilaian. Untuk menjamin objektivitas, konselor perlu menggunakan alat ukur dan metode asesmen yang telah memiliki standar ilmiah, serta menunjukkan validitas dan reliabilitas yang baik berdasarkan pengujian empiris. Prosedur administrasi juga harus dilaksanakan dengan konsisten sesuai dengan pedoman yang telah

ditetapkan. Dalam hal ini, para profesional dituntut untuk memiliki kompetensi teknis yang cukup, termasuk pemahaman terhadap karakteristik alat ukur yang digunakan dan keterampilan dalam menafsirkan hasil asesmen.

Selain itu, konselor perlu menyadari adanya bias internal, seperti stereotip yang muncul akibat budaya, etnis, gender, agama, atau status sosial, yang dapat memengaruhi secara tak sadar cara mereka melihat konseli. Oleh karena itu, sangat penting bagi para profesional untuk secara aktif mengelola prasangka pribadi dan meningkatkan kesadaran diri mereka melalui pelatihan dalam keberagaman budaya dan supervisi profesional yang berkelanjutan.

Objektivitas juga meliputi kemampuan untuk menerima hasil asesmen apa adanya, meskipun hasil tersebut mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi awal atau pandangan pribadi konselor. Profesional yang beretika mau mengubah interpretasi mereka jika ada data baru yang lebih tepat, dan mereka akan mengutamakan kepentingan konseli di atas keinginan pribadi. Maka dari itu, pengembangan kompetensi profesional secara terus-menerus adalah bagian penting dari praktik etis, yang mencakup mengikuti pelatihan, membaca literatur akademis terbaru, dan berpartisipasi dalam komunitas ilmiah yang relevan (Corey, G, Corey, M, & Callanan, P, 2015).

Objektivitas dalam evaluasi psikologis mengharuskan konselor untuk terhindar dari pengaruh pribadi, prasangka, atau faktor luar saat mengumpulkan dan menganalisis informasi. (Daniati, Solfema, & Karnel, Penerapan Prinsip Etika dan Estetika dalam Bimbingan Konseling, 2024) menegaskan bahwa prinsip etika seperti menjaga kerahasiaan, kompetensi, dan keadilan berpengaruh pada hubungan terapeutik antara konselor dan klien, serta pada mutu layanan bimbingan konseling secara keseluruhan. Di sisi lain, (Yulianti, Afriani, & Wahyuni, 2024) menggarisbawahi perlunya profesionalisme dalam ranah konseling, dengan penekanan pada penentuan standar praktik yang tegas, etika dalam konseling, serta peningkatan profesionalisme melalui pelatihan dan pengawasan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Studi literatur dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam berbagai pandangan teoretis dan temuan empiris mengenai etika dalam asesmen psikologis, khususnya dalam konteks bimbingan dan konseling. Data diperoleh melalui telaah terhadap artikel jurnal ilmiah, buku teks akademik, dan pedoman etika profesi psikologi dan konseling dari lembaga kredibel seperti APA dan HIMPSI.

Setiap karya yang digunakan dianalisis untuk menemukan kesamaan dan perbedaan dalam pandangan mengenai penerapan etika asesmen dalam praktik konseling, termasuk bagaimana konselor memahami serta menghadapi tantangan dalam menjaga kerahasiaan dan objektivitas asesmen. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai pentingnya penerapan prinsip etika dalam asesmen psikologi dan dampaknya terhadap kualitas layanan bimbingan dan konseling. Metode ini juga menawarkan kebebasan untuk menjelajahi fenomena yang kompleks dan kontekstual, serta mendorong pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik profesional konselor di situasi nyata.

Menurut (George, 2008), studi literatur merupakan pendekatan yang efektif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis konsep-konsep kunci dari berbagai sumber tertulis guna membentuk pemahaman konseptual yang komprehensif terhadap suatu isu. Dalam konteks ini, peneliti meninjau topik-topik seperti prinsip kerahasiaan, objektivitas asesmen, serta implikasinya dalam praktik konseling.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Etika dalam Menjaga Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah prinsip fundamental dalam pelaksanaan asesmen psikologis. Tinjauan terhadap berbagai sumber menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip ini dapat merusak hubungan antara konselor dan konseli serta mengurangi efektivitas bantuan yang diberikan (Corey, G, Corey, M, & Callanan, P, 2015). Dalam praktik sehari-hari, menjaga kerahasiaan mencakup tidak hanya menyimpan hasil tes, tetapi juga pengelolaan dokumen, berkas digital, dan diskusi profesional terkait kasus.

Sebagai contoh, seorang konselor sekolah yang melakukan asesmen untuk mengenali siswa yang mengalami kecemasan sosial harus memastikan bahwa data hasil asesmen disimpan dengan aman dan hanya dibagikan kepada pihak yang relevan, dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tua siswa (Sullivan, J. R, Ramirez, E, Rae, W. A, Peña Razo, M, & George, C, 2002).

Namun, ada situasi etis yang rumit di mana kerahasiaan harus dilanggar secara sah, seperti ketika konseli menunjukkan tanda-tanda mengancam diri sendiri atau orang lain. Dalam keadaan ini, prinsip untuk memberikan peringatan harus diprioritaskan sesuai dengan pedoman etika (APA, 2017).

### Analisis Etika dalam Menjaga Objektivitas

Tinjauan literatur juga mengungkapkan bahwa objektivitas dalam asesmen dapat terpengaruh oleh bias budaya, prasangka pribadi, atau tekanan dari lembaga (Neukrug, 2016). Konselor diharapkan untuk mengurangi bias dengan menggunakan alat ukur yang telah distandarisasi, memperhatikan latar belakang budaya konseli, dan bersikap reflektif saat melakukan interpretasi hasil asesmen.

Misalnya, ketika menerapkan tes kepribadian MBTI atau tes minat Holland, konselor perlu memperhitungkan konteks sosial, pengalaman pendidikan, dan nilai-nilai pribadi konseli agar hasil interpretasi tidak merugikan atau terlalu sempit.

### Kelebihan dan Keterbatasan Asesmen dalam Konteks Etika

Kelebihan dari asesmen psikologis yang dilakukan secara etis meliputi:

1. Memberikan wawasan yang menyeluruh mengenai konseli dari sudut pandang profesional.
2. Menjadi landasan untuk pengambilan keputusan konseling yang akurat.
3. Meningkatkan rasa percaya konseli terhadap proses konseling.

Sedangkan keterbatasan yang diidentifikasi melalui studi literatur adalah:

1. Masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip kerahasiaan, khususnya di lembaga pendidikan yang melibatkan banyak pihak.
2. Potensi bias dalam proses pelaksanaan dan interpretasi asesmen jika tidak didukung oleh pelatihan dan supervisi yang terus menerus.

## KESIMPULAN

Etika dalam pelaksanaan asesmen psikologi di bidang bimbingan dan konseling adalah elemen penting yang berfungsi sebagai panduan bagi para profesional serta melindungi hak-hak konseli. Berdasarkan tinjauan teoritis dan analisis pustaka, dua prinsip etika utama dalam asesmen psikologis dapat diidentifikasi yaitu kerahasiaan dan objektivitas. Kedua prinsip ini saling berhubungan dan merupakan dasar untuk membangun kepercayaan antara konselor dan konseli serta memastikan keabsahan hasil asesmen yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan di praktik konseling.

Kerahasiaan dalam asesmen mengharuskan konselor untuk menjaga semua informasi pribadi konseli dengan aman dan tidak membagikannya tanpa izin. Dalam praktiknya, ini termasuk penyimpanan data, pengolahan hasil asesmen, serta komunikasi antar profesional.

Pelanggaran terhadap prinsip ini bisa berdampak negatif yang besar pada kepercayaan konseli dan kelangsungan proses konseling. Namun, prinsip ini juga memiliki batasan, terutama dalam situasi di mana keselamatan diri konseli atau orang lain terancam, sehingga prinsip "kewajiban untuk memperingatkan" harus diterapkan. Di sisi lain, objektivitas asesmen mengharuskan konselor untuk menghindari segala bentuk bias dan prasangka selama proses asesmen, mulai dari pemilihan alat ukur hingga interpretasi hasilnya. Penggunaan instrumen yang terstandarisasi dan mempertimbangkan konteks budaya konseli adalah hal yang sangat penting untuk memastikan keadilan dan akurasi data. Kesadaran etik dan proses refleksi yang terus menerus diperlukan agar konselor tidak terjebak dalam penilaian subjektif yang bisa merugikan konseli.

Dalam konteks pelaksanaan di Indonesia, ada berbagai tantangan yang masih ada, seperti kurangnya pemahaman etika di kalangan tenaga konseling, keterbatasan dalam pelatihan profesional yang berkelanjutan, dan kurangnya pengawasan etis yang ketat di lembaga pendidikan serta layanan psikologis. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pemahaman tentang etika profesi, meningkatkan kompetensi asesmen yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, dan membangun budaya profesional yang akuntabel sebagai langkah-langkah strategis yang perlu diambil.

Secara keseluruhan, etika dalam asesmen psikologi seharusnya tidak dianggap sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai komitmen moral dan profesional untuk melayani konseli dengan penuh integritas, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Penerapan etika asesmen yang konsisten akan memberikan dampak positif terhadap efektivitas layanan bimbingan dan konseling serta memperkuat reputasi profesi konselor di mata masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, M., Budiman, N., & Nadirah, N. A. (2023). Etika Penggunaan Tes Psikologi Dalam Bimbingan Dan Konseling. *Science and Education Journal (SICEDU)*, 273-285.
- Anindya, J., Budiman, N., & Nadhiroh, N. (2024). Etika Profesi Bimbingan dan Konseling: Menghadapi Tantangan Kerahasiaan dalam Layanan Konseling Online. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 25-35.
- Aristri, A. (2024). Etika Profesi Bimbingan dan Konseling: Asas Kerahasiaan Dalam Konseling Kelompok. *Empati: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 161-173.
- Corey, G, Corey, M, & Callanan, P. (2015). *Issues and Ethics in the Helping Professions (9th ed.)*. Cengage Learning.
- Daniati, N. H., Solfema, & Karnel, Y. (2024). Penerapan Prinsip Etika dan Estetika dalam Bimbingan Konseling. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 46403-46408.
- Daniati, N. H., Solfema, S., & Karneli, Y. (2024). Penerapan Prinsip Etika dan Estetika dalam Bimbingan Konseling. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 46403-46408.
- George, M. W. (2008). *The Elements of Library Research: What Every Student Needs to Know*. Princeton University Press.
- Gibson, R.L, & Mitchel, M.H. (2008). *Introduction to Counseling and Guidance*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Gregory, R. J. (2014). *Psychological Testing: History, Principles, and Applications (7th ed.)*. Pearson.
- Neukrug, E. (2016). *The World of the Counselor: An Introduction to the Counseling Profession (5th ed)*. Cengage Learning.
- Pardamean, A., Nasution, M. L., Safni, L. H., Izzatunnisa, Y., Nasution, A. P., & Syapitri. (2024). Analisis Etika Profesi BK terhadap Pelaksanaan Layanan Konseling Berbasis Online. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 651-660.

Sullivan, J. R, Ramirez, E, Rae, W. A, Peña Razo, M, & George, C. (2002). *Confidentiality, Informed Consent, and Ethical Considerations in Reviewing the Client's Psychotherapy Records*. ERIC.

Yulianti, R., Afriani, D., & Wahyuni, S. (2024). Profesionalisme Guru BK dalam Pelayanan Konseling di Era Kurikulum Merdeka. *Menara Ilmu: Jurnal Pendidikan*, 75-82.